

BATAK DAN BUKAN BATAK: PARADIGMA SOSIOHISTORIS TENTANG KONSTRUKSI IDENTITAS ETNIK DI KOTA MEDAN, 1906-1939

Hidayat, Erond L. Damanik

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara-Indonesia

Alamat koresponding: hidayat@unimed.ac.id

Diterima/ Received: 27 Juni 2018; Disetujui/ Accepted: 28 Agustus 2018

Abstract

This research discusses the sociohistorical paradigm of Batak label construction on Mandailing and Angkola ethnicities in the city of Medan, 1906-1939. Throughout the year, the two ethnic migrants from southern Tapanuli clashed in Medan because of the Batak labeling. The Mandailing ethnic group rejected the Batak label, while the Angkola ethnic group affirmed on that label. The disputes have an impact on the division of political, economic, religious and cultural identities. The rejection from Mandailing ethnic on Batak labeling continues to occur until 2017. This research aims to describe the construction of the Batak label by answering general questions on how do the two ethnic groups fight because of the Batak label? Specifically, this article also answers the origin of Batak labeling? Why is the label debated? To explain this case, the theory of social construction is used with the sociohistorical paradigm and the case study research method. The results of the study that the Batak label is considered as a foreign ethnographic construction with a pejorative tone and disputes occur because of the strategic stability of identity as a social radar to understand the social world.

Keywords: *Batak; Social Construction; Urban Identity; Plural Society.*

Abstrak

Penelitian ini membahas paradigma sosiohistoris tentang konstruksi identitas Batak pada etnis Mandailing dan Angkola di kota Medan, 1906-1939. Sepanjang tahun, dua migran etnis dari Tapanuli Selatan bentrok di Medan karena label Batak. Kelompok etnis Mandailing menolak label Batak, sementara kelompok etnis Angkola menegaskan identitas tersebut. Sengketa berdampak pada pembagian identitas politik, ekonomi, agama, dan budaya. Penolakan etnis Mandailing dari label Batak terus terjadi hingga 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi label Batak dengan menjawab pertanyaan umum bagaimana dua kelompok etnis tersebut bertempur karena label Batak? Secara khusus, artikel ini menjawab asal-usul label Batak? Mengapa label identitas itu diperdebatkan? Untuk menjelaskan kasus ini, metode sejarah digunakan dalam menganalisis masalah itu dengan menggunakan paradigma teori konstruksi. Hasil penelitian bahwa label Batak adalah konstruksi etnografi asing dengan nada merendahkan yang menyebabkan perselisihan di antaranya.

Kata Kunci: Batak; Konstruksi Sosial; Identitas Etnik; Masyarakat Majemuk.

PENDAHULUAN

Pada 23 Oktober 2017 di Hotel Madani Medan diselenggarakan seminar *'Mandailing Bukan Batak'* dengan tiga narasumber yaitu Usman Pelly (Antropolog), Ichwan Azhari (Sejarawan), dan Erond L. Damanik (Antropolog). Menurut Usman Pelly, label Batak bagi kedua etnik

pendatang dari selatan Tapanuli di Medan menimbulkan sengketa pekuburan Sei Mati, 1922-1925. Etnik Mandailing menolak Batak sementara etnik Angkola mengukuhkan Batak sebagai identitasnya. Kontradiksi label Batak berdampak pada penolakan etnis Mandailing menguburkan jenazah etnik Angkola di pekuburan Islam Sei Mati Medan. Pertikaian ini

berdampak pada pembelahan identitas, politis, religius, ekonomi dan kultural di daerah rantau (*bona ni ranto*).

Menurut Azhari konstruksi label Batak berasal dari etnograf asing guna membedakan masyarakat yang beragama Islam di pesisir dengan masyarakat pagan di pedalaman. Dampak dari pelebelan tersebut merembes dan mengarah pada pembelahan okupasi dan paguyuban etnik. Promosi-promosi identitas baru pasca pertikaian itu dilakukan melalui surat kabar yang dimiliki keduanya, saling lempar wacana berupa pendiskreditan dan penonjolan identitas masing-masing. Menurut Damanik, secara historis asal mula dan konstruksi label Batak muncul pertama kali di literatur sejak abad XIV dari tulisan Tome Pires (Perret, 2010; Reid, 2009). Wilayah dan masyarakat yang dilabeli Batak cenderung bergeser-geser, pada 1515 terletak di pantai timur dan 1539 terletak di pantai barat Sumatra Utara (Reid, 2009), sejak 1883 melebar, terletak dari pantai barat hingga Labuhanbatu kemudian pada 1925 terkonsentrasi di utara Danau Toba (Perret, 2010). Menurutnya, sumber pertikaian pada etnik Mandailing dan Angkola di Medan sejak 1906 adalah pembentukan Karasidenan Tapanuli. Selanjutnya label Batak semakin mengristal karena dikukuhkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Secara etnografis, label Batak di Medan khususnya, merujuk pada masyarakat yang tergabung dalam subetnik Angkola, Mandailing, Karo, Pakpak, Simalungun, dan Toba.

Dalam sejarah etnik Batak, pengukuhan label Batak oleh pemerintah kolonial Belanda merupakan sumber inti pertikaian etnik Mandailing dan Angkola di Medan. Pertikaian tersebut terus berlanjut terkait dengan masalah pendirian *Bataks Instituut* di Leiden (1908), sengketa di *Sjarikat Tapanuli* (1920), sengketa pekuburan Sei Mati (1922) dan pendirian *Batakraad* (1939). Walaupun pertikaian sempat “mereda” pada awal keduanya migrasi ke Medan pada 1880-an, tetapi sejak awal abad XX, keduanya bertikai karena label itu (Perret, 2010).

Setelah seminar berlangsung, pertikaian label Batak dan Bukan Batak semakin menyeruak, semakin panas di antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra karena adanya pemberitaan

bombastis di media daring seperti *Tirto*, *Mandailing Online*, dan *Medan Bisnis Daily*. Kelompok pro Batak menyebut label itu sudah ada sejak dahulu yang berasal dari leluhur enam sub-etnik Batak. Sementara kelompok kontra, menyebut label Batak sama sekali tidak berasal dari leluhur, ahistoris, peyoratif, dan sengaja ditempelkan pada masyarakat yang belum beragama samawi.

Kelompok pro-label Batak, seperti terungkap dari komentar mereka di media daring, menuduh bahwa seminar *Mandailing Bukan Batak* sebagai respon dan ketersinggungan etnik Mandailing terhadap ucapan Joko Widodo yang menyebut: ‘*ia akan menjadi bahagian keluarga besar Batak*’. Mereka menyebut seminar bernada politis dan sengaja dilakukan guna memecah kesatuan ‘keluarga besar Batak’. Mereka juga menuduh panitia sengaja memilih narasumber yang tidak representatif karena tidak mengikutsertakan narasumber dari setiap etnik Batak.

Kelompok kontra, anti-Batak tetap kukuh pada pendirian, bahwa label Batak berasal dari luar dengan tujuan merendahkan. Kelompok ini menyebut label Batak sama sekali tidak memiliki benang merah dengan perusahaan *Sjarikat Tapanuli* yang menerbitkan koran *Pewartar Deli*. Dari perspektif sosial historis, label Batak berkaitan dengan pertikaian dua etnik pendatang dari selatan Tapanuli sepanjang 1906-1939 di Kota Medan yang disebabkan penamaan *Karasidenan Tapanuli* (1906). Etnik Mandailing menolak nama Keresidenan Batak dan menganjurkan nama Keresidenan Tapanuli.

Penolakan label Batak berlanjut pada 1920 terkait dengan kepengurusan perusahaan *Sjarikat Tapanuli* yang menerbitkan koran *Pewartar Deli*. Sengketa berujung pada pembelahan perusahaan *Sjarikat Tapanuli* menjadi perusahaan *Sjarikat Mandailing* dan perusahaan *Handelmaatschappij Batak*. Setelah pecah kongsi perusahaan *Sjarikat Mandailing* yang sebelumnya menerbitkan *Pewartar Deli* berganti mencetak koran *Soeara Mandailing*, sedangkan etnik Angkola mendirikan perusahaan *Handelmaatschappij Batak* dan mencetak surat kabar *Pentjaran Berita*.

Kontradiksi label Batak dan bukan Batak, Angkola versus Mandailing, tidak berhenti pada sengketa kepengurusan perusahaan *Sjarikat Tapanuli*, melainkan berlanjut pada sengketa pekuburan Islam Sei Mati di Medan pada 1922 dan pendirian *Batakraad* (Dewan Batak) pada 1939. Pada peristiwa sengketa pekuburan Sei Mati, etnik Mandailing menolak jenazah orang Angkola yang mengaku Batak dikuburkan di pemakaman Sei Mati. Sengketa ini mengundang perhatian serius dari *zelfbestuur* Melayu, Residen Sumatera Timur, Walikota Medan hingga Gubernur Jenderal. Gugatan dilayangkan di *Kerapatan Deli* dan ke *Landraad* dan *Raad van Justicie* (Perret, 2010). Pascaputusan *Raad van Justicie*, kedua etnik saling lempar wacana melalui surat kabar yang mereka miliki.

Pertikaian serupa berlangsung pada 1930, etnik Mandailing menolak didaftar dengan label Batak Mandailing pada *volkstelling* pada 1930. Namun, Pemerintah Kolonial tidak mengakomodasi permintaan itu dan tetap mendatanya Batak Mandailing. Pertikaian tahun 1939 terkait dengan pembentukan *Batakraad* (Dewan Batak) di Karasidenan Tapanuli, dimana etnik Mandailing menolak nama *Batakraad*. Etnik Mandailing menawarkan nama sesuai keresidenan dan berupaya meniadakan label Batak, sementara etnik Angkola meneguhkan label Batak sebagai identitasnya. Pertikaian label Batak pada kedua etnik mengakibatkan pertikaian dan pembelahan identitas politik, ekonomi, religius dan kultural di Kota Medan.

Secara empirik, penduduk yang dipersatukan pada label Batak yang terdiri subetnik Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun dan Toba tidaklah homogen. Keenam subetnik ini berbeda atribut objektif (bahasa dan dialek, genealogi, sejarah, kepercayaan, struktur dan organisasi sosial, atribut kultural, adat istiadat dan kebiasaan), atribut primordial (Shils, 1957:132; Geertz, 1967:22) dan identitas subjektif (Royce, 1983:11). Melalui cara pandang ini, label etnik terus mengalami pengonstruksian sebagai cara menegaskan perbedaan antar etnik (Barth, 1969:9; Hale, 2004:2). Bila mengacu cara kerja Bruner (1961:261) yang menetapkan kategori-kategori label Batak maka menurut Kipp dan

Kipp (1983:5) cara demikian sedang menciptakan orang Batak.

Penelitian ini memfokuskan pada analisis konstruksi identitas Batak dan bukan Batak pada etnik Mandailing dan Angkola yang mengakibatkan pertikaian antar etnik Mandailing dan Angkola dalam rentang waktu lebih dari tiga dekade tepatnya dari tahun 1906-1939 di kota Medan. Sesuai dengan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana akar dan latar sejarah label Batak dan bukan Batak pada masa kolonial Belanda di Medan? Dari mana asal usul konstruksi label Batak dan bukan Batak? dan mengapa label itu diperdebatkan? (2) Bagaimana dinamika sosial dalam relasi antar etnik yang berdampak pada pertikaian antar etnik Mandailing dan Angkola di Medan? Bagaimana dampak dari pertikaian tersebut pada kedua etnik di Medan?

Untuk menganalisis pokok masalah tersebut digunakan paradigma sosiohistoris. Dalam paradigma sosiohistoris, konstruksi identitas sosial bersifat dinamis, instrumen meredefenisi, merekonstruksi dan merevitalisasi identitas kelompok sosial dan etnik dipengaruhi oleh dunia sosial kulturalnya. Identitas sosial ditempatkan sebagai radar sosial. Kontribusi dari kajian ini diarahkan untuk menemukan faktor-faktor sejarah, sosial budaya, dan politik munculnya label Batak, mengungkap proses dan *setting* sosial budaya dan politik label Batak dan bukan Batak dikonstruksi dan berdampak pada masyarakat yang dilabelkan. Pertikaian etnik yang terjadi pada 1906-1939 yang bersumber dari pelabelan Batak, dapat dimaknai sebagai kecelakaan sejarah dan sengketa memalukan bagi masyarakat urban. Menguatnya konstruksi identitas ini dalam ruang kota Medan yang dihuni multietnik dan majemuk sosial, kultural, politik dan ekonomi hanya mengakibatkan kompleksitas masalah dan beban ruang perkotaan dan warga kota.

Berdasar pemikiran tersebut, maka kajian tentang pertikaian etnik yang terjadi pada 1906-1939 dalam latar paradigma sosiohistoris, dimaksudkan untuk (1) menemukan penjelasan akar dan latar sejarah label Batak dan bukan Batak di Kota Medan pada masa kolonial Belanda di Kota Medan; (2) Mengeksplorasi dinamika

sosial dalam relasi antar etnik berdampak pada pertikaian antar etnik Mandailing dan Angkola di Kota Medan. Dari kajian ini diharapkan menjadi sumber inspirasi edukasi dalam upaya mewujudkan keharmonisan sosial dalam relasi sosial antar etnik di kota Medan.

METODE

Penelitian ini memfokuskan pada analisis konstruksi identitas Batak dan bukan Batak pada etnik Mandailing dan Angkola yang berujung terbelahnya kehidupan sosial politik dan ekonomi para pihak yang bertikai dalam rentang waktu 1906-1939 di Medan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pembacaan ulang terhadap naskah-naskah, referensi, catatan-catatan, jurnal, tesis dan disertasi yang relevan. Selain itu, untuk memperkaya wacana, penulis juga menelisik laporan etnograf seperti Conti (1857), Rugua (1966), Cortesao (1944), Mills (1970), Pinto (1991), Dion (1970), de Haan (1897) terutama Anderson (1971) dan Marsden (2008). Dalam kesempatan ini penulis juga melakukan penelusuran berita melalui surat kabar *Pewarta Deli*, *Soera Mandailing*, *Pentjaran Berita*, dan tulisan-tulisan sepanjang tahun 1906-1939 seperti Hutagalung (1926), Loeb (2013), Masland (1939), Meerwadlt (1922), Joustra (1902; 1915), Westenberg (1905), Tideman (1932) dan informasi lain yang relevan pada zamannya. Tulisan dan hasil riset mutakhir seperti Perret (2010), Reid (2009; 2011), Hirouse (2009), Pardede (1975), Pelly (2013), Castels (1967) dalam kajian menjadi semacam *state of the arts* tentang konstruksi etnik Batak di Sumatera Utara.

Hasil penelusuran naskah dan dokumen secara heuristik selanjutnya dianalisis dengan menggunakan paradigma sosiohistoris untuk melacak akar-akar kemunculan label Batak, faktor yang melatarbelakangi, makna yang dikandung, serta reaksi dari etnik yang dilabelkan. Paradigma sosiohistoris diperkaya melalui keragaman sumber dari berbagai lintas disiplin ilmu seperti sejarah, antropologi, arkeologi, etno-histori maupun sosiopolitik. Naskah dan hasil riset seperti De Haan (1897), Dion (1970), Husny (1978), Bangun (1982), Cortesao (ed.) (1944),

Conti (1857), Keuning (1954), Kipp dan Kipp (ed.) (1983), Mills (ed.) (1970), Vorhooeve (1955), Viner (1980), Adelaar (1981), Kozok (2009), Groeneveldt (1960), van Langenberg (1972) dalam penelitian ini dilakukan kritik sumber dan *contextual analysis* guna menemukan *novelty* (kebaharuan) sekaligus kontribusi kajian ini.

AKAR DAN LATAR HISTORIS PELABELAN ETNIK BATAK DAN BUKAN BATAK

Identitas Batak merupakan pelabelan etnograf asing sejak abad XIV menunjuk pemukim di pedalaman (*inland*) utara Sumatra (Conti, 1857:8; Rugua, 1966:62; Cortesao, 1944:89; Mills, 1970:115; Pinto, 1991:61; Dion, 1970:143; de Haan, 1897:647; van Langenberg, 1972: 116). Menurut Perret (2010:59), label Batak diberikan guna menyebut cara-cara hidup masyarakat pemukim di pedalaman (*inland society*) atau pegunungan (*hinterland society*) yang disebut liar (*savage*), belum beradab (*uncivilized*), penyembah berhala (*pagan*) ataupun *eat human flesh*. Mereka ini berbeda dari pemukim di pesisir yakni Melayu yang disebut telah beradab, cenderung teratur serta menganut agama Islam. Kategori sosial seperti ini menjadi dasar penentuan batas alamiah dan kultural secara topografis, politis, dan historis (Perret, 2010).

Pardede (1975:5), menilai pelabelan Batak bernada peyoratif adalah konstruksi orang lain. Karena itu Loeb (2013:4) berpendapat, label Batak berasal dari konstruksi orang Melayu untuk membedakan diri mereka yang bermukim di pesisir dengan masyarakat yang bermukim di pedalaman. Hal senada disampaikan Hirouse (2009), istilah itu sengaja disematkan orang Melayu pada label Batak mengingat perannya sebagai broker perdagangan yang menghubungkan pedalaman dan pesisir. Melalui peran itu, *local informant* mendapat keuntungan ekonomi di bandar-bandar niaga di pesisir. Menurut Damanik (2017:17, 95; 2017:61), citra peyoratif label Batak sengaja diciptakan informan lokal kepada pedagang asing guna menciptakan rasa takut, sehingga membatasinya masuk ke pedalaman. Cara itu dilakukan guna memberi jaminan posisi sebagai broker. Informasi

diperoleh pedagang asing dari informan lokal terus diproduksi sewaktu kembali ke negaranya. Melalui catatan atau pun memoar perjalanan mereka, label Batak dikonotasikan peyoratif dan terus dirujuk hingga dewasa ini.

Selama kolonialisme, label itu dijadikan dasar pembentukan Keresidenan Tapanuli yang merdeka dari Propinsi Sumatera Barat sejak 1906 serta dipisahkan dari Keresidenan Pantai Timur Sumatera. Menurut Joustra (1902:385; 1910:8) dan Westenberg (1897:1-112, 1905:576-603), kedua karasidenan berbeda bila dilihat dari aspek topografis, politis, dan historis sebagaimana ditegaskan Perret (2010:373). Pada satu sisi label Batak terkait dengan gagasan memecah etnisitas (Reid, 2011:5), ataupun mempolarisasi etnisitas (Geertz, 1967), namun di sisi lain bermanfaat mempererat perasaan menjadi bagian dari (Perret, 2010) atau pun membentuk keluarga besar Batak (Castles, 1967:68). Bangun (1982: 21) menyatakan label Batak dikonstruksi guna menyebut enam subetnik yang bermukim di Sumatera Utara. Menurut Damanik (2018:9), pelabelan ini menciptakan identitas kabur bukan saja karena diciptakan dari luar, tetapi juga karena kegagalan menunjuk siapa sebenarnya orang atau penduduk yang dimaksud dengan label itu.

Proses pengidentifikasian Batak di Pesisir Timur Sumatera terbentur bagi pendatang dari selatan Tapanuli terutama Mandailing. Namun, Pemerintah Kolonial menganggap kedua etnik beragama Islam ini dalam satu kesatuan label Batak. Sebagian besar elite kedua etnik adalah lulusan sekolah Zending Kristen. Catatan Wijngaarden (1894:133) menyebut bahwa mereka mengingkari label Batak yang dinilai memalukan dan memilih menganggap diri sebagai Melayu walaupun mereka telah menempuh pendidikan di sekolah zending di kampung halamannya.

Perret (2010:224) menjelaskan sejak pertengahan abad ke, orang Mandailing memanfaatkan pendidikan umum yang mendorong berkembangnya sebuah elite beragama Islam berpendidikan Belanda. Sejak 1872, orang Mandailing memiliki sekolah guru di kampungnya dan lewat pendidikan ini membuka wawasan baru bagi elite Mandailing dengan cara merantau ke Pesisir Timur Sumatra. Menurut

Kipp dan Kipp (1983) pelabelan dipengaruhi fenomena agama seperti menjadi Melayu (*become Malay*) adalah menjadi Islam (*become Islam*). Namun, khusus etnik Angkola di Medan, fenomena ini tidak berlaku karena sejatinya mereka beragama Islam. Namun, sebutan Batak Islam berkonotasi Islam kasar menjadi faktor reduksi label Batak. Kenyataan lain adalah reduksi identitas di perkotaan tidak bisa dilepaskan dari faktor pendidikan dan ekonomi guna menentukan posisi religius, politis, ekonomi, dan kultural pada masyarakat majemuk. Cara ini dilakukan untuk merebut dan menguasai peluang-peluang sosial sekaligus cerminan masyarakat beradab.

Sebagaimana disebut Joustra (1915:56), walaupun Pemerintah Kolonial pada pertengahan abad XIX membangun sekolah di Residensi Tapanuli (baik Mandailing dan Angkola) tetapi *Misi Sungai Rhein (RMG)* memegang monopoli pendidikan di wilayah kerjanya. Monopoli pendidikan ini terus terjadi hingga tahun 1914 saat berdirinya sekolah umum kelas dua di Balige dan Tarutung. Pendidikan *Misi Sungai Rhein* memberi dampak mobilitas vertikal bagi penduduk asli Batak. Puluhan ribu pemuda meninggalkan sektor pertanian dan bekerja di sektor tersier. Fenomena ini membentuk suatu lapisan masyarakat kaya dan ambisius di samping adanya elite tradisional. Menurut Joustra (1915:56) berbekal pendidikan dari kampung halaman ke Medan, etnik Mandailing meredefenisi identitasnya dan menyingkirkan label Batak. Kenyataan ini ditunjukkan melalui sertifikat-sertifikat, akta-akta, dan lamaran pekerjaan atau pun promosi produk mencantumkan kata Mandailing tanpa label Batak (*Pewartar Deli*, 1922). Kenyataan ini disebabkan sikap orang Mandailing yang ingin melepaskan diri dari label 'Batak' sejak 1910. Sikap mereka menjadi cukup radikal dan terpaksa mengemukakan pandangan mereka di daerah rantau maupun di kampung halaman. Orang Mandailing menyebut tidak ada relasi historis dengan silsilah orang Mandailing. Menurut mereka, etnik Mandailing hanya menginginkan diperlakukan sebagai bangsa tersendiri yaitu bangsa Mandailing.

Menurut Castles (1967) kelompok Mandailing di Medan memiliki senjata ampuh meraih simpati *zelfbestuur* Melayu Deli lewat posisi ekonomi yang lebih kuat. Di pihak lain, kelompok Angkola makin bertambah dan percaya diri dan ancaman yang mereka tebarkan kepada kelompok yang lebih mapan itu merupakan akar dari pertentangan.

Zelfbestuur Melayu Deli dan elite Mandailing tampaknya khawatir terhadap mobilitas vertikal elite Angkola di Medan. Karenanya mereka terus berupaya menyingkirkan label *habatahon* yang sebelumnya mengental dan melekat pada dirinya. Melalui kekuatan ekonomi yang dimilikinya, elite Mandailing berupaya menendang elite Angkola dari lembaga yang mereka bangun bersama. Castles (1967: 202) menulis sebagai berikut:

Sutan Parlindungan berhenti sebagai anggota redaksi Pewarta Deli setelah bekerja 15 tahun. Majalah baru Soera Mandailing didirikan dan sebagai alat orang Mandailing, sedangkan kelompok Angkola mendirikan Penjtaran Berita sebagai jawabannya. Klub sepakbola dan sekolah swasta berbahasa Belanda terbagi dua. Sebuah perkumpulan baru bernama Pardomuan Batak didirikan untuk menghadapi Sjarikat Mandailing. Demikian pula perusahaan baru bernama Handelsmaatschapij Batak didirikan untuk menyaingi Sjarikat Tapanuli yang dikuasai orang Mandailing.

Pada 1926, Mangaradja Ihoetan dan Abdoellah Loebis pemimpin koran *Pewarta Deli* menyusun risalah tentang sengketa kuburan Sei Mati: *Riwayat Tanah Wakaf Bangsa Mandailing di Sungai Mati Medan*. Tulisan ini meringkas kedudukan etnik Mandailing mereduksi label Batak. Seperti disebut Husny (1978:62), alasan Mandailing menolak label 'Batak' adalah sebagai berikut: (1) Merujuk pendapat Wilken bahwa Batak adalah agama politeis dan mencerminkan kanibalisme; (2) Merujuk pendapat Junghuhn bahwa bahasa Mandailing bukan bahasa Batak; (3) Merujuk pendapat van Dijk bahwa leluhur Mandailing berasal dari orang *Loeboe*; (4) Adanya pengaruh Hindu di Mandailing yang berbeda dengan Hindu di Angkola.

Merujuk Perret (2010:211) etnik Mandailing lebih memilih identitas sebagai Mandailing (saja) dan menyingkirkan label Batak bukanlah hal baru khususnya bagi perantau. Penyingkiran identitas yang dilakukan etnik Mandailing terhadap label Batak terkait erat dengan posisi politis dan ekonominya yang dicapai lewat pendidikan. Pada saat munculnya kesadaran melalui proses pendidikan yang terlihat dari keberhasilan ekonomi dan politiknya, terdapat upaya meredefenisi identitas etniknya. Redefenisi itu dilakukan guna menegaskan perbedaan-perbedaan walaupun tidak signifikan, tetapi terus diproduksi. Situasi ini dapat terwujud apabila kelompok etnik merasakan kemapanan hidup. Kenyataan sebaliknya pada etnik Angkola, meskipun pada taraf tertentu sudah merasakan kemapanan hidup, terjadi proses akomodasi terhadap identitas lama. Cara ini dilakukan sebagai strategi mempertahankan eksistensi sambil terus memperbaiki kemapanan hidup yang cita-citakan.

Situasi etnisitas (*ethnicity situation*) yang ditunjukkan perilaku etnik Mandailing dan Angkola berkaitan dengan kehidupan *urban* dalam upaya mempertahankan eksistensi hidup, memperbaiki citra diri, memperkaya dan memperluas jejaring ekonomi serta peneguhan posisi politis di hadapan *zelfbestuur* Melayu Deli ataupun Pemerintah Kolonial. Hanya saja, posisi ekonomi etnik Mandailing lebih kuat dibanding etnik Angkola sehingga menyebabkan mereka lebih mudah diterima. Sementara itu, mobilitas etnik Angkola menimbulkan kekhawatiran bagi etnik Mandailing dan *zelfbestuur* Melayu Deli, sehingga keduanya bersekongkol menendang etnik Angkola di panggung politis dan ekonomi di Medan.

Penolakan label Batak tidak hanya terjadi pada etnik Mandailing di Medan, tetapi juga daerah lain di Sumatera Utara selama periode kolonial. Pada 1947 misalnya etnik Karo menolak label Batak. Selanjutnya, pada 1963-1964, etnik Simalungun menolak label Batak (Dasuha, 2012: iii). Etnik Pakpak pada 1964 menolak label Batak (Agustono, 2010:167; Damanik, 2016:302). Penolakan identitas tersebut terdorong faktor pendidikan yang memberikan gambaran untung-rugi pelabelan. Fenomena ini wujud karena

kelompok mapan memberikan citra peyoratif pada kelompok yang dianggap pesaing. Karena itu, pertimbangan laba rugi pelabelan menjadi faktor penolakan ataupun pengakomodasian terhadap suatu identitas. Menurut Royce (1983:53), walaupun keduanya beragama Islam, namun dibanding etnik Mandailing, maka etnik Angkola lebih dapat berdamai dengan label Batak. Kenyataan ini terkait erat dengan keberhasilan hidup yang berhasil diraih melalui faktor pendidikan ditambah posisi ekonomi dan politik yang dicapai selama di daerah rantau. Mobilitas vertikal dan sektor tersier yang dicapai lewat pendidikan menjadi horison baru menyingkirkan atau mengakomodasi label Batak tanpa memerdulikan makna di balik label itu.

Dampak Label Batak dan Bukan Batak

Mengacu Perret (2010:257), Medan adalah menjadi wilayah yang pertama muncul fenomena pembelahan etnik secara politik dan religius. Dalam pandangan Bruner (1961:508), tekanan sosial dihadapi para migran (pendatang) di wilayah kosmopolit ini menyebabkan para pendatang menyamakan label awal dan mengaku Melayu atau Batak Islam. Namun, penyamaran sebagai Batak Islam belum tentu mengamankan dirinya sebab istilah itu identik dengan Islam yang suka melawan atau keras kepala (label Batak sebagai identitas awal). Hal ini dialami etnik Angkola di Medan ketika membawa kasus pekuburan Sei Mati di hadapan swapraja Deli maupun pengadilan. Pembelahan etnik berdasar orientasi politik dan religius di Sumatera Timur sejak 1906 berkaitan dengan penataan administratif yang ditetapkan Pemerintah Kolonial. Penentuan batas-batas administrasi di wilayah ngara kolonial, membuat suasana kebatinan etnisitas semakin meningkat. Setiap etnik meredefenisi dan merekonstruksi identitas etniknya guna menegaskan perbedaan dengan yang lain. Sebagian etnik migran menyamakan identitas Batak dan mengaku Melayu. Namun, sebagian di antaranya mengakomodasi label Batak melalui pembentukan paguyuban *Sjarikat Islam Tapanuli*, *Jamiyah Batak Islam* dan lain-lain. Semua fenomena ini muncul karena penetapan batas-batas

administrasi kolonial yang didasarkan pada batas alamiah dan kultural. Penentuan batas kultural ini merujuk pada redefenisi label etnik sebagai cara memasuki dunia sosial yang mencerminkan posisi religius, politis, ekonomi, dan kultural.

Sampai batas tertentu, tingginya migrasi etnik di Medan seperti Tionghoa, India, Jawa, Mandailing, Angkola, Toba, Simalungun, Minangkabau, Arab, Aceh dan lain-lain pada gilirannya menyingkirkan Melayu sebagai etnik tuan (*ethnic host*). Bukan saja dipengaruhi dalam hal populasi, tetapi hak ulayat bergeser ke etnis pendatang (Lamry, 1996:2). Perpindahan penduduk ke kota Medan menurut Reid (2011:11) mulai terjadi tahun 1915 lewat pengorganisasian Pemerintah Kolonial dari utara dan selatan Tapanuli. Menurut Castels (1967:21) mereka diorganisasi untuk mengolah persawahan, mengisi jabatan rendah di Pemerintahan Kolonial maupun menjadi pedagang. Menurut Cunningham (1958:9), perpindahan penduduk ke Medan dalam jumlah besar terjadi pascaperang (*postwar migration*). Setiap etnik mengembangkan label etnik secara religius dan kultural guna menentukan basis politik dan ekonomi (Purba dan Purba, 1998; Bruner, 1981; Pedersen, 1975; Hasselgren, 2008).

Fenomena sama terjadi di Jakarta (Nainggolan, 2006:21). Redefenisi dan rekonstruksi identitas dilakukan melalui politik kekerabatan dan kebudayaan (Castles, 1967:153; Reid, 2010:21) maupun agama (Schreiner, 2008:7). Karena itu, tidak mengherankan apabila kota Medan pada periode awal *gemeente* mencerminkan *segmented residential* yakni adanya kampung etnik *seperti* kampung Cina (*Chinesewijk*) di Kesawan, kampung Eropa (*Europewijk*) di Polonia, kampung India (*Indianwijk*) di Madras, kampung Melayu (*Inlanderswijk*) di Kota Maksim. Lemahnya kultur dominan (*dominant culture*) di Kota Medan menurut Bruner (1961:58) disebabkan semakin dominan dan besarnya pendudukan pendatang, lemahnya penguasaan ekonomi dan politik oleh penduduk tuan rumah dan penguasaan jabatan publik di Medan, membuat setiap kelompok etnik (*ethnic group*) leluasa mengembangkan identitas etnik (*ethnic*

identity). Kenyataan seperti ini, menurut Pelly (1984:8) berdampak pada kesulitan akulturasi dan asimilasi budaya sebab terdapat garis pembatas antaretnik. Oleh karena itu, lebih khusus menyoal pemukiman dibutuhkan pengaturan ulang guna menghilangkan batas-batas etnik (*ethnic borderless*) seperti penempatan ruang publik dan fasilitas pemerintah di garis pembatas.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa upaya mempersatukan Batak pada suatu label tidak saja terjadi pada era kolonial, tetapi juga terus berkembang pascakolonialisme. Resistensi berupa pereduksian label Batak terus terjadi sejalan dengan kegagalan etnograf asing dan Pemerintah Kolonial menunjuk populasi etnik Batak. Menurut Reid (2009:157), selama kolonialisasi dan dekolonialisasi populasi dan sebaran wilayah etnik Batak berubah-ubah. Walaupun label Batak disebut pada komunitas di utara Tapanuli, tetapi sesungguhnya mereka memiliki nama tersendiri yakni Toba. Oleh karenanya, pelabelan Batak adalah identitas yang kabur (*evasive identity*). Penjelasan ini menegaskan bahwa identitas etnik adalah fenomena yang manipulatif. Identitas dimanipulasi secara rasional oleh aktor etnik untuk memperoleh akses ke setiap sumber materi, sosial, dan politik.

Dari uraian di atas dapat ditarik simpulan bahwa kajian ini menegaskan identitas tidak berbasis pada primordialisme tetapi senantiasa dikonstruksi. Gejala pengonstruksian secara politis (McKay, 1981:395) adalah permainan etnik (van den Berghe, 1976:21) sebagai bentuk kemantapan strategis identitas etnik (Glazer dan Moynihan, 1963:11). Identitas merupakan strategi (Royce, 1983) dan instrumen mobilisasi (Hale, 2008) guna merebut peluang sosial. Pengonstruksian identitas menurut Nagata (1976:224; 1981:94) dilakukan melalui penciptaan mitos asal usul, kekerabatan, wilayah, bahkan agama, bahasa atau pun silsilah guna mengesahkan hubungan dan kekerabatan internal. Pemahaman label masa lalu sejalan dengan kemantapan strategis identitas menjadi dasar redefinisi label pada masa kini. Proses identifikasi senantiasa melibatkan nilai intrinsik dan elite guna mengeliminasi kelompok lain dalam

perebutan sumberdaya. Oleh karenanya identitas tidak merujuk pada adanya ikatan primordial yang askriptif dan permanen. Namun, identitas bersifat dinamis dan terus dikonstruksi tergantung situasi etnisitasnya yakni peluang sosial yang mungkin dapat diraih. Identitas etnik adalah referensi personal, sumber motivasi dan konstruksi simbol sosial yang berperan sebagai radar sosial guna memahami dunia sosial.

PERTIKAIAN ETNIK MANDAILING DAN ANGKOLA DI MEDAN

Pada 1774, Marsden (2008:6) telah menolak homogenisasi masyarakat pedalaman Sumatera sebagaimana dilakukan etnograf sebelumnya. Ia menyebut terdapat perbedaan bahasa, adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan pada etnik *Mandheling* [Mandailing], *Pappak Deira* [Pakpak Dairi], *Teba* [Toba], maupun *Padambola* [Padang Bolak atau Angkola] yakni pemukim di antara pegunungan Pakpak Dairi hingga Air Bangis di Natal. Penolakan yang sama muncul dari Anderson (1971:251) dalam lawatannya ke pantai timur Sumatra pada 1823. Lewat tulisannya *Mission to the Eastcoast of Sumatra in 1823*, Marsden menyoal adanya perbedaan bahasa, kebiasaan sehari-hari, prinsip ketatanegaraan dan adat istiadat pada masyarakat pedalaman. Anderson menulis adanya etnik bernama *Karau-karau* [Karo], *Semilongan* atau *Semalongan* [Simalungun] termasuk *Gaioux* [Gayo] yang bermukim di pesisir timur Sumatera. Anderson menegaskan etnik *Mandiling* [Mandailing], *Tubba* [Toba], dan *Pappak* [Pakpak] bermukim di pesisir barat Sumatra.

Loeb (2013:4) dalam etnografinya tahun 1926-1927 menyebut populasi Batak sangat heterogen dari bahasa, agama, sejarah, budaya, dan genealogi. Bahkan, Pardede (1975:5) menyebut istilah Tanah Batak (*Batakland*) ataupun orang Batak (*Batakvolk*) berasal dari *auslander gepraht*. Liddle (1970:21) menyebut interaksi sosial antara kelompok-kelompok etnik di Sumatra Utara hingga abad XIX mencerminkan relasi antar-individu, antar-kampung, antarkelompok kekerabatan dan tidak terdapat kesadaran yang menjadi bagian satuan-

satuan sosial dan politik yang lebih besar. Menurutnya, ketidakjelasan label Batak menjadi dasar populasi menyusun sejarah masing-masing menyangkut bahasa, sejarah, asal usul, genealogi, agama, dan atribut kultural.

Mandailing dan Angkola adalah dua kelompok etnik berasal dari selatan Tapanuli. Etnik Mandailing terkonsentrasi di daerah Panyabungan, Kotanopan, Hutapungkut, Natal, dan lain-lain, sedangkan etnik Angkola terkonsentrasi di Padangbolak atau Padanglawas dan Sipirok (Pelly, 2013). Dari segi klan, kedua etnik memiliki klan yang terpisah. Pada subetnik Mandailing terdapat klan Nasution, Rambe, Daulay, Tanjung, Lubis, Rangkuti, dan lain-lain; sedangkan pada subetnik angkola terdapat klan seperti Siregar, Harahap, Pasaribu, Hasibuan, Pohan dan lain-lain (Siregar, 1983). Dari gaya bahasa, dialek dan aksara, kedua subetnik menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan variasi. Variasi dialek atau logat pada kedua sub etnik dipengaruhi ekologi dan interaksi sosial. Hanya saja kedua subetnik ini merupakan penutur bahasa Sansekerta dan aksaranya berasal dari *Pallawa* (Vorhoeve, 1955:24, Viner, 1980:85, Adelaar, 1981:3 dan Kozok, 2009:63).

Menurut Castels (1975:93) kepemimpinan tradisional pada kedua etnik mencerminkan *stateless*. Menurut Kipp dan Kipp (1983:4), kedua etnik lebih memperhatikan kesamaan klan sebagai dasar relasi sosial daripada genealogi. Keduanya tidak memiliki kemampuan mengurus genealogi seperti etnik Toba. Viner (1980:8) memandang bahwa kedua etnik memiliki persamaan bila dilihat dari kekerabatan partilineal, perkawinan klan eksogami serta lebih menginginkan pernikahan lintas sepupu sebagai dasar pembentuk segitiga kuliner (*dalihan na tolu*). Sebelum masuknya agama samawi, kedua etnik sangat dipengaruhi kebudayaan Hindu (Parkin, 1978:12). Bukti nyata hingga saat ini tampak pada keberadaan candi-candi periode Hindu-Buddha di Padanglawas (Schnitger, 1995: 209) dan Simangambat (Soedewo, 2014:89). Periode Padri di Bondjol Sumatera Barat (1922-1938) menginvasi selatan Tapanuli, membuat agama Islam menyebar dan dianut kedua etnik (Dobbin, 1983:31, Meerwaldt, 1922:295, Keuning, 1954:170).

Menurut Perret (2010), sejak awal 1880-an, kedua etnik merantau dari kampung halaman (*bona pasogit*) ke pantai timur Sumatera (*bona niranto*) guna mencari sumber-sumber penghidupan tersier. Keduanya sama sekali tidak memperlakukan label Batak (*habatahon*) yang diusung dari kampung halaman. Kolaborasi yang mantap dari kedua etnik pendatang di Medan tampak pada pendirian perusahaan *Sjarikat Tapanuli* yang mencetak surat kabar *Pewarta Deli*. Namun, persimpangan jalan mulai nampak pada saat merasakan kesuksesan hidup. Pendidikan menghantar mereka ke dunia pekerjaan menengah di Kota Medan, kedekatan kepada *zelfbestuur* Melayu Deli dan Pemerintah Kolonial, ataupun kemampuan membaca referensi (publikasi) Barat. Gejala ini menjadi faktor memperdebatkan label Batak.

Upaya penyingkiran label Batak jelas tampak sejak 1906. Menurut Castles (1967:204), elite Mandailing menolak disebut Batak dan bermula dari rencana pemandirian *Karasidenan Tapanuli* dari Sumatera Barat pada 1906. Pada saat itu, Pemerintah Kolonial merencanakan pembentukan *Residentie Batak* (Pemdasu, 1904:105). Elite etnik Mandailing yang merasakan kesuksesan hidup di Medan melakukan penolakan. Mereka menyarankan menghindari Batak karena istilah itu bernada peyoratif. Walaupun tidak semata-mata karena penolakan elite Mandailing, Pemerintah Kolonial menamai residensi dengan Keresidenan Tapanuli (*Residentie Tapanoelly*). Nama *Tapanoelly* sangat populer pada catatan etnograf. Secara etimologis, *tapien* (pantai) dan *uli* (indah), yang berarti pantai yang indah. Pemberian nama Keresidenan Tapanuli menunjuk pada kesatuan identitas sebagai perlambang yang melampaui seluruh persaingan tradisional di antara daerah yang dihomogenkan pada residensi itu. Penulis Castles (1967) merujuk catatan Schroder (1920: 21) menulis sebagai berikut:

Seperti Mandailing, yang sampai taraf tertentu berhasil meningkatkan kehidupan awal mereka yang bersahaja menganjurkan menghindari penggunaan nama Batak dan menamakan keresidenan itu, yang terdiri dari daerah-daerah Batak, Tapanuli sesuai nama

teluk yang terkenal itu, dimana ibu kotanya akan didirikan.

Merasa berhasil mereduksi label Batak pada Keresidenan Tapanuli, tidak menjadi akhir sengketa bagi elite etnik Mandailing. Penyingkiran label Batak merujuk pada perusahaan yang dibangun bersama kedua etnik itu. Pada 1920, etnik Mandailing dan Angkola bersengketa di *Sjarikat Tapanuli*, sebuah perusahaan percetakan yang menerbitkan surat kabar *Pewartar Deli*. Sesama anggota di perusahaan ini sebagian diantaranya mengaku Batak yakni orang Angkola, dan sebagian menolak Batak yakni orang Mandailing. Pertikaian ini mendekati eksplosif pada saat pemilihan ketua *Sjarikat Tapanuli*. Mekanisme pemilihan cara *voting* dimenangkan etnik Angkola. Kemenangan ini membuat beberapa elite Mandailing merasa tidak senang. Mangaradja Ihoetan dari etnik Mandailing dan menempuh pendidikan *Bestuurschool* di *Batavia* (Jakarta) sekaligus ketua *Battakers Bond* menyarankan tidak memperdebatkan label Batak. Namun saran itu tidak mampu mendamaikan kedua etnik di internal *Sjarikat Tapanuli*. Pada bulan Desember 1921, elite Mandailing membentuk perkumpulan sendiri bernama *Sjarikat Mandailing* yang diketuai Mohammad Noech. Salah satu keputusan *Sjarikat Mandailing* menurut berita *Pewartar Deli* (1922) ialah melarang orang bukan Mandailing menjadi anggotanya. Berdasar pada putusan itu, seluruh Angkola harus memilih 'menjadi Mandailing' atau tetap Batak Angkola. Namun, *Pewartar Deli* (1922) memberitakan bahwa etnik Angkola tetap menganggap orang Mandailing sebagai orang Batak.

Pada Maret 1922, dilakukan pemilihan anggota di *Sjarikat Tapanuli*. Sebagian besar anggota terpilih berasal dari etnik Mandailing. Pada tahun itu, Sutan Parlindungan, seorang Angkola adalah pimpinan perusahaan dan kemudian digantikan Mangaradja Ihoetan seorang Mandailing. Kecewa dengan pemilihan itu, membuat elite Angkola mendirikan perusahaan *Handelmaatschappij Batak* sebagai rival *Sjarikat Tapanuli*. Perusahaan ini menerbitkan koran *Pentjaran Berita* sebagai rival *Pewartar Deli*. Perusahaan dipimpin Haji

Mohammad Tahir, mantan direktur *Sjarikat Tapanuli*. Sebuah perkumpulan dibentuk *Pardomuan Batak* di internal Angkola sebagai rival *Sjarikat Mandailing*. Sejak 1922, kedua etnik pendatang di Medan ini saling serang dan lempar wacana melalui surat kabar yang mereka miliki. Abdoelah Lubis, ketua *Sjarikat Mandailing* sekaligus anggota *Gemeenteraad* (Dewan Kota) tidak dapat mengelak dari lempar wacana. Perang wacana kedua etnik diberitakan *Pewartar Deli* tanggal 3 April 1922, 17 Mei 1922, 5 Juni 1922, dan 16 Juni 1922. *Sjarikat Mandailing* menuduh bahwa leluhur orang Angkola pada awalnya adalah berekor dan mengklaim leluhur Mandailing berasal dari orang *Loeboe*. Keberadaan etnik ini sudah pernah dicatat Kremer (1912) maupun Butar-butar, Abubakar, dan Damanik (1984) tetapi keberadaannya dianulir dalam referensi antropologi moderen Jakarta.

Pertikaian di *Sjarikat Tapanuli* merembes ke pertikaian pekuburan Sei Mati Medan. Menurut Pelly (2013), pada Agustus 1922 seorang Angkola meninggal dunia dan hendak dimakamkan di pekuburan Sei Mati. Namun, pengurus kuburan menolak pemakaman jenazah karena dianggap sebagai orang Batak. Walaupun jenazah sudah tiba di pekuburan, namun karena penolakan jenazah urung dimakamkan. Peristiwa memalukan dicatat Castels (1967) sebagai berikut:

Pada 1889, sekelompok 'Batak Muslim' (Mandailing dan Angkola) di Medan membeli dan memperuntukkan sebidang tanah di Sei Mati, Medan, untuk pekuburan. Ketika itu kebanyakan pendatang di Medan berasal dari Mandailing. Itu sebabnya, istilah ini (Batak Muslim) dalam bahasa sehari-hari digunakan untuk mengacu semua orang yang berasal dari Tapanuli Selatan. Tiba-tiba pada tahun 1922 pengurus kuburan menolak memakamkan orang Sipirok, Angkola dan Padanglawas, karena di dalam akta dinyatakan secara tegas bahwa tanah pekuburan tersebut diperuntukkan bagi orang Mandailing.

Pada April 1922 elite etnik Mandailing memutuskan pekuburan Sei Mati hanya diperuntukkan bagi 'bangsa Mandailing', berasal

dari Mandailing atau merasa Mandailing. Putusan ini adalah dampak pertikaian kedua etnik di *Sjarikat Tapanuli*. Sejumlah elite Mandailing seperti Haji Ibrahim, Mohammad Noech (direktur *Sjarikat Tapanuli*) dan Haji Hoesin (penghulu Sei Mati) yang mendapat kabar rencana pemakaman itu menghadap *Tengku Besar* (Putra Mahkota Melayu Deli). Setelah pertemuan, Tengku Besar mengutus pengawalannya melarang pemakaman jenazah etnik Angkola. Namun, etnik Angkola mengabaikan larangan itu dan terus menggali kubur. Pengabaian larangan Tengku Besar oleh etnik Angkola membuat sejumlah etnik Mandailing bersiap-siap bentrok menjelang sore hari. Namun, dalam berita *Pewarta Deli*, 24 Mei 1922, disebut jasad etnik Angkola dimakamkan di Sei Kerah Medan.

Sengketa pekuburan Sei Mati adalah luapan eksplosif memburuknya relasi etnik Mandailing dan Angkola di Medan. Sengketa ini mendapat perhatian luas di Medan karena efek pemberitaan berupa ejekan dan umpatan melalui surat kabar milik kedua etnik. Penyelesaian sengketa pekuburan tidak dapat diputuskan *zelfbestuur* Melayu Deli karena kedua etnik ini adalah *kawula* atau rakyat Kesultanan Melayu Deli. Meskipun walikota Medan maupun residen Sumatra Timur turut campur, namun kedua etnik yang bertikai tidak dapat berdamai. Pada November 1922, dibentuk komisi menyelesaikan pertikaian pekuburan Sei Mati. Pembentukan komisi ini diprakarsai Gubernur Pantai Timur Sumatra. Komisi diketuai Sultan Deli serta terdiri atas empat anggota yaitu Sultan Deli, satu utusan pemerintah, satu utusan Mandailing, satu utusan Angkola dan sisanya dipilih mereka berempat. Komisi ini menetapkan pekuburan Sei Mati Medan adalah milik etnik Mandailing (Perret, 2010).

Putusan itu tidak saja membuat etnik Angkola kecewa, tetapi juga menggugatnya di Pengadilan Negeri (*landraad*) Medan. Gugatan dimenangkan etnik Angkola bahwa mereka berhak atas pekuburan di Sei Mati. Namun, orang Mandailing melakukan banding dan dimenangkan Pengadilan Tinggi (*Raad van Justicie*). Keputusan ini diterima etnik Angkola dan mendapat tanah pekuburan sendiri di Sei Kerah (Winckel, 1925:31). Selanjutnya, melalui putu-

san Gubernur Jenderal ditetapkan bahwa pekuburan Sei Mati diperuntukkan bagi orang Islam minus kata Mandailing (*Sumatera Post*, 6 Jakarta 1925). Pascasengketa pekuburan Sei Mati, etnik Mandailing terus menolak label Batak Mandailing.

Menyikapi rencana sensus penduduk (*volkstelling*) pada 1930, *Comite Kebangsaan Mandailing* (Komite Nasional Mandailing) di Panyabungan mengajukan permintaan kepada Pemerintah Kolonial agar tidak didaftar 'Batak-Mandailing' (Tideman, 1932:42). Namun, di dalam *volkstelling* mereka tetap didaftarkan dengan Batak-Mandailing. Kecewa dengan putusan itu, etnik Mandailing terus mereduksi penyebutan Batak-Mandailing. Pada 1939, sehubungan rencana pembentukan Dewan Batak (*Batakraad*) di Keresidenan Tapanuli, etnik Mandailing menolak penggunaan kata Batak. Derasnya polemik identitas Batak pada kedua etnik imigran di Medan memerlukan pengecekan darah. Hasil pengecekan daerah tidak menyuguhkan perbedaan diantara kedua etnik yang bertikai itu (Masland, 1939:23).

Elite Mandailing semakin radikal menuntut penyingkiran label Batak sejak pendirian *Batak Instituut* di Leiden 1908 (Pelly, 2013). Pendirian badan sosial ini bertujuan menghimpun dana, melakukan penelitian serta memprakarsai pembangunan di Tanah Batak. Lewat badan ini, sejumlah etnik Angkola dan Toba menulis referensi sebagai promosi identitas mereka. Bagi etnik Mandailing, pendirian badan ini seolah-olah menjadi penegasan label Batak pada setiap pemukim di Tapanuli sebagaimana mereka tolak pada 1906. Pada 1920 di Batavia (Jakarta) dibentuk *Battakers Bond* (Syarikat Batak) untuk mempercepat relasi sesama anggota serta memajukan bangsa Batak di bidang pertanian, perdagangan, kerajinan tangan, kesehatan dan pendidikan. Menurut pemberitaan *Pewarta Deli* (1922), pada Februari 1922, Mangaradja Ihoetan, seorang elite Mandailing dan pelajar di *Bestuurschool Batavia* menjadi ketua *Battakers Bond*. Adapun anggota persekutuan adalah orang Batak terpelajar dan terhormat, beragama Kristen dan Islam. Di Jakarta, persekutuan ini menerbitkan majalah

Sahala Batak sebagai wadah gagasan dan ide kreatif membangun 'orang Batak'.

Pada 1920, persekutuan ini mendirikan *Bataksche Bank* (Bank Batak) di Pematangsiantar. Pendirian *Bataksche Bank* dimaksudkan membantu petani terjerat utang pada pedagang *Chetty*. Pengelolanya adalah orang Angkola kaya di Pematangsiantar dan menjadi perusahaan yang paling kuat di Sumatera Timur. Pada 1928, bank ini mendapat suntikan dana dari Kas Negara. Bank ini menyantuni pendatang Toba di Simalungun serta memberikan dana usaha pertanian kepada mereka. Pada 1921 didirikan *Klub Sepak Bola Batak*. Pendirian klub ini adalah semacam keharusan pada saat itu karena semakin tingginya animo penonton sepak bola. Pemerintah Kolonial memfasilitasi setiap klub bermain di Stadion Kebun Bunga di *Candistraat* (Jalan Candi) pada setiap akhir pekan (Damanik, 2016:362).

Di Sipirok pada 1921, elite etnik Angkola mendirikan *Batak Studie Fonds* (Dana Studi Batak) yang digagas intelektual Angkola seperti Abdulrasjid, Sutan Gunung Mulia, dan Sutan Kumala Bulan. Beberapa pengurus inti adalah orang Mandailing. Tujuan pendiriannya adalah membuka sekolah berbahasa Belanda, penampungan penderita kusta, membangun klinik dan asrama bagi pelajar (Castels, 1967). Pada September 1922, sebagian orang Angkola menarik diri dari *Batakkers Bond* karena Batak dikonotasikan agama dan bukan bangsa. Selanjutnya, orang Angkola yang menarik diri dari *Batakkers Bond* menurut *Pewartar Deli* (1922) membentuk *Angkola bond*, dan sebagian kecil lainnya masuk *Mandailingers Bond*. Menurut Pelly (2013:115) sebagian orang Angkola di Medan mendirikan *Jong Batak* pada 15 Februari 1922 serta mendirikan perkumpulan *Parloehoetan Batak Marsioeropan* (Perkumpulan Persaudaraan Batak).

Pada tahun yang sama di Kutaradja (Banda Aceh) dibentuk *Jong Battaker* (pemuda Batak) yang diketuai Abdul Hamid dan Badu Hasyim. Tujuan badan ini ialah memberikan pelajaran bahasa Belanda secara murah kepada setiap anggotanya yakni orang Angkola, Mandailing dan Toba. Pada 1920 seperti diberitakan *Pewartar Deli* (1919), badan ini diketuai Isa Dalimunthe dan

Farel L. Tobing. Merujuk *Kroniek van de Ooskust van Sumatra Instituut* (1917:42) di Medan 1917 didirikan perkumpulan persaudaraan *Setia Mandailing*. Menurut Tideman (1932:42) menjelang 1930 dibentuk perkumpulan *Persatoean Mandailing* bertujuan memperkuat kesatuan sesama orang Mandailing. Menurut *Pewartar Deli* (1939) perkumpulan bertujuan melakukan kajian mengenai pembentukan *Groepsgemeenschap* di Tapanuli sebagaimana diwacanakan Pemerintah Kolonial. Menurut Tichelman (1936:35), perkumpulan melakukan pertemuan guna mendiskusikan budaya Mandailing, pembacaan puisi maupun pertunjukan seni tradisional. Diskusi dilakukan dalam bahasa Mandailing dan Melayu.

Merujuk *Pewartar Deli* pada 15 Oktober 1919 dan 7 November 1919, di Medan beredar undangan rapat untuk membahas masalah adat *bangso Batak (taringot to bangso Batak dohot adatna)*. Peserta undangan dari Aceh dan pesisir timur berdatangan ke Medan. Namun, orang Mandailing menolak berpartisipasi karena merasa tidak ada sangkutpautnya dengan adat dan bangsa Mandailing. Berdasar *Pewartar Deli* (1920), sebuah komite bernama *Komite Peranakan* mengumumkan tentang rencana pemberian penghargaan dari Hoesein Djajadiningrat dan van Vollenhollen kepada setiap orang yang mampu menjelaskan silsilah orang Batak. Permintaan itu terutama ditujukan bagi perkumpulan *Sarekat Islam Tapanuli, Koeriah Bond dan Hatopan Batak Kristen*. Pada Agustus 1922, sebanyak 28 orang pemimpin Batak menandatangani pernyataan yang disebut *Batak Maninggoring*. Pernyataan itu mendeklarasikan bahwa Mandailing merupakan bangsa Batak, dan Batak tidak berkonotasi agama maupun negeri, tetapi menunjuk pada sebuah bangsa yang bermukim di Residensi Tapanuli.

Seperti telah disebut di awal, pada 1908 di Leiden, Belanda dibentuk *Bataksch Instituut* (Lembaga Batak). Tujuannya untuk menghimpun dana, melakukan penelitian maupun memprakarsai pembangunan di 'tanah Batak'. Lewat badan ini, Sutan Martua Raja Siregar seorang guru di *Normalschool* Pematangsiantar dari Sipirok menulis tentang bahasa dan dialek Batak bagi seluruh orang di Tapanuli (Vorhoeve,

1955:55). Sejumlah tulisan bernada apologetis turut mewarnai referensi saat itu seperti Boemi (1925) menulis tentang hak tanah di Tapanuli, Simalungun dan Karo (1925), Burhanuddin menulis tentang *Perkawinan Mandailing* (1922), Soangkupon menulis *Adat Batak* (1923), ataupun Pane menulis *Adat Batak* (1922). Pada 1926, Hutagalung menerbitkan tulisannya tentang *tarombo* (silsilah) orang Batak. Hutagalung (1926:7) maupun Vergouwen (1964:5) menyebutkan bahwa seluruh orang Batak adalah satu keluarga besar.

Merari Siregar menulis novel *Azab dan Sengsara* (1921) tentang adat perkawinan tradisional Sipirok dalam kemasan moderen. Penulis lainnya Diapari Siregar menulis *de Bataksche Taal* (1922) tentang bahasa Batak. Lewat tulisan-tulisan itu, Siregar di utara dan selatan Tapanuli (Toba dan Angkola) mengaku bersaudara kandung. Penulis lain Hutapea (1929) mengumpulkan kronik *primus inter pares* Singamangaraja, sedangkan Tampubolon menulis tentang semacam *Summa Theologia adat Batak* (Schreiner, 2008:4). Tulisan berupa buku atau pun catatan ini menjadi promosi identitas Batak bagi etnik Angkola tidak hanya di Medan tetapi juga di Jakarta. Promosi-promosi identitas lewat catatan ini sangat penting bagi mereka terutama sebagai monumen hidup yang selamanya dirujuk, dikutip, dan dikenang. Strategi etnik Angkola ini berbanding terbalik dengan etnik Mandailing.

Promosi identitas etnik Mandailing lebih kepada oral dan elitis yang disampaikan ke kampung halamannya. Jenis promosi lainnya ialah melalui kebudayaan materil seperti Batik Mandailing guna menunjuk pakaian tradisional yang diproduksi Fabrik Batik Bangsa Mandailing di Tulungagung (*Pewartar Deli*, 1927). Sementara itu, catatan-catatan tertulis menyangkut promosi identitas etnik Mandailing di Medan hampir tidak dilakukan. Merujuk *Pewartar Deli* (1922) etnik Angkola mengklaim bahwa etniknya jauh lebih maju dibanding etnik Mandailing, karena kerajinan dan kepandaian yang dimiliki. Selain itu, etnik Angkola mengklaim lebih banyak menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, badan sosial maupun badan usaha ekonomi. Mereka menye-

but diri lebih kaya dan gaji yang lebih besar di setiap sektor ekonomi. Bahkan terdapat sejumlah elite etnik Angkola yang kaya raya yang kekayaannya itu jauh mengalahkan kekayaan elite etnik Mandailing.

Dari uraian di atas tampak kekhawatiran elite Mandailing terhadap mobilitas etnik Angkola. Elite Mandailing merasa bahwa persaudaran etnik Angkola tidak saja terjadi di Medan tetapi menyebar ke Jakarta, Kutaradja, Pematangsiantar bahkan di kampung halamannya. Aktifnya elite etnik Angkola membangun badan-badan sosial untuk meneguhkan silaturahmi sekaligus membangun Batak menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi etnik Mandailing. Pertikaian kedua etnik menyangkut label Batak di Medan tidaklah mempersoalkan makna peyoratif label Batak tetapi justru kekhawatiran pada mobilitas sosial secara vertikal yang memiliki dampak politis, ekonomi, religius dan kultural.

Kedua etnik yang bertikai menyangkut label Batak memperlihatkan bahwa elite kelompok mapan yakni Mandailing mereduksi label Batak, sementara kelompok pesaing, Angkola berdamai dengan label tersebut. Perdamaiannya dengan label itu bukan hanya mengidentifikasi dirinya, tetapi juga menegaskan label itu pada etnik Mandailing. Tampak bahwa kelompok pesaing terus menarik kelompok mapan dalam satu kesatuan label Batak sebagai cara mengidentifikasi diri pada kelompok mapan. Walaupun terus mendapat penolakan dari kelompok mapan, tetapi kelompok pesaing terus menyamakan dirinya dengan kelompok mapan sambil terus memperbaiki diri mereka. Pembelaan etnik secara politis, ekonomi, religius, dan kultural dipahami sebagai cara menunjuk eksistensi keduanya di perkotaan. Situasi etnisitas seperti ini dipandang sebagai bagian dari kemantapan strategi identitas dan permainan etnik yang berperan sebagai strategi masyarakat majemuk memahami dunia sosial.

SIMPULAN

Dari penelusuran sejumlah naskah dan dokumen, dapat disimpulkan bahwa akar dan latar belakang penggunaan label Batak dan Bukan Batak pada subetnik Mandailing dan Angkola merupakan redefinisi identitas kultural di tanah rantau yang

dipicu oleh keberhasilan politik dan ekonomi. Pada subetnik Mandailing, penyingkiran label Bukan Batak, atau menjadi Melayu dan menjadi Islam untuk membangun jejaring ekonomi dan penguatan posisi politik dalam relasinya dengan kekuatan politik dan ekonomi di hadapan *zelfbestuur* Melayu Deli atau pun Pemerintah Kolonial di Medan. Hal serupa dilakukan oleh subetnik Angkola. Redefinisi identitas kultural dilakukan guna menegaskan perbedaan-perbedaan walaupun tidak signifikan, tetapi terus diproduksi.

Produksi label dan redefinisi identitas kultural dapat terwujud apabila kelompok etnik mencapai kemapanan hidup. Kenyataan ini menunjukkan bahwa redefinisi identitas sebagai identitas yang kabur dan manipulatif. Identitas dimanipulasi secara rasional oleh aktor etnik untuk memperoleh akses ke sumber materi, sosial dan politik.

Proses redefinisi label Batak dan Bukan Batak pada subetnik Mandailing dan Angkola berdampak serius terhadap ekonomi, politik dan religiusitas pelakunya. Etnik Mandailing yang menyamakan label awal dan mengaku Batak Islam, nyatanya belum aman, karena itu istilah itu identik dengan Islam yang suka melawan atau keras kepala. Pada etnik Melayu sebagai *ethnic host*, penguatan label sebagai bukan Batak berujung tragis, penyingkiran *ethnic host* oleh *migrant ethnic*. Pada subetnik Angkola redefinisi label Batak juga tidak mengamankan religiusitas mereka, karena harus menahan rasa malu jenazahnya ditolak dimakamkan di pekuburan Islam Sei Mati. Redefinisi identitas kultural yang berlangsung di tengah tidak adanya *dominant culture* mendorong setiap kelompok etnik leluasa mengembangkan identitas etnik yang ternyata berdampak pada kesulitan akulturasi dan asimilasi budaya, karena label Batak dan Bukan Batak menjadi garis demarkasi dan pembatas hubungan antar etnik.

Pertikaian etnik Mandailing dan Angkola di Medan pada 1906-1939 dipicu oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang memicu pertikaian kedua etnik terkait keputusan pendirian *Residentie Batak, volkstelling* 1930, pendirian *Batakraad, Bataksche Bank* oleh pemerintah kolonial Belanda. Faktor internal

pemicu pertikaian adalah penolakan pemakaman jenazah di pekuburan Sei Mati dan sengketa kepengurusan perusahaan *Sjarikat Tapanuli*. Secara hipotetis pertikaian kedua etnik terkait dengan kemantapan strategis identitas baru guna mengakomodasi atau menendang etnik lain dalam perebutan peluang ekonomi dan politik di ruang kota yang majemuk dan kompleks. Pertikaianya tidak hanya terkait makna peyoratif label Batak, melainkan kekhawatiran pada mobilitas sosial pesaing secara vertikal yang memiliki dampak politis, ekonomi, dan religi.

REFERENSI

- Adelaar, Alexander K. (1981). "Reconstruction of proto-Batak phonology". *Nusa* 10:1-20.
- Agustono, Budi (2010). "Rekonstruksi Identitas Etnik: Sejarah Sosial-Politik Orang Pakpak di Sumatera Utara (1958-2003)". Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Anderson, John (1971). *Mission to the Eastcost of Sumatera in 1832*. London, New York: Oxford University Press.
- Bangun, Payung (1982). "Kebudayaan Batak", dalam Koentjaraningrat (ed). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Barth, Fredrik (1969). *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Boston: Little Brown and Co.
- Berghe, Pierre van den (1976). "Ethnic Pluralism in Societies: A Special case study". *Ethnicity* 3 (3): 242-255-.
- Bruner, Edward M (1975). "Statelessness and State Forming Tendencies Among the Batak before Colonial Rule". in Pre-colonial State system of Southeast Asia. Anthony Reid and Lance Castels (eds). Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Monograph No. 6. Kuala Lumpur.
- Bruner, Edward M (1981). "Migration and the Segmented Self", in Rainer Carle (ed.), *Cultures and Societies of North Sumatra*. Hamburg, Dietrich Reimer Verlag.

- Bruner, Edward M. (1961). "Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatera". *American Anthropologist* 63: 509-521.
- Butar-butur, M, Abu Bakar, dan U.H. Damanik, U.H (1984) *Morfologi dan Sintaksis Bahasa Siladang*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Castels, Lance (1967). "The Ethnic Profile of Djakarta. *Indonesia* 1 (April): 153-204.
- Conti, Nicolo de' (1857). *The Travels of Nicolo de' Conti in the East, in India, and the Fifteenth Century*. New York: Burt Franklin.
- Corteseo, Armando (1944). *The Suma Oriental of Tome Pires*. Series II. London: Hakluyt Society.
- Cunningham, Clark E. (1958). *The Postwar Migration of the Toba Bataks to East Sumatera*. Yale: Yale University Southeast Asia Studies.
- Damanik, Erond L. (2016). "Kontestasi Identitas Etnik pada Politik Lokal: Studi tentang Makna Etnisitas di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara". Disertasi Program Doktor Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.
- Damanik, Erond L. (2017). "Sumatra dan Kabar-kabar Kanibalisme", dalam *Sumatera Silang Budaya: Kontestasi Nilai-nilai Historis, Arkeologis, dan Antropologis serta Upaya Pelestarian Cagar Budaya*. Sri Sugiharta (ed.). Batusangkar: BPCB Sumatera Barat.
- Damanik, Erond L. (2017). *Agama, Perubahan Sosial dan Identitas Etnik: Moralitas Agama dan Kultural di Simalungun*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, Erond L. (2018). "Menolak Evasive Identity: Memahami Dinamika Kelompok Etnik di Sumatera Utara". *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 4 (1): 9-22.
- Dion, M (1970). "Sumatra through Portuguese eyes: excerpts from Joao de Barros". *Indonesia* 9, pp. 143.
- Dobbin, Christine (1983). *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatera, 1784-1847*. London: Curzon Press.
- Geertz, Clifford (1967). "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States," in Clifford Geertz (ed.) *Old Societies and New States*, 3rd Edition. New York: The Free Press.
- Glazer, Nathan and Moynihan, Daniel P (1963). *Beyond the Melting Pot: The Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians, and Irish of New York*. Massachusetts: The MIT Press.
- Groeneeldt, W.P (1960). *Historical Notes on Indonesia and Malaya: Compiled from Chinese Sources*. Jakarta: Bharata.
- Haan, F. (1897). "Een oud bericht aangaande de Bata's", in *Tidjschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 39: 647.
- Hasselgren, Johan (2008). *Batak Toba di Medan: Perkembangan Identitas Etno-religius Batak Toba di Medan, 1912-1965*. Medan: Bina Media Perintis.
- Hirouse, Masashi (2009). "The Role of Local Informants in the making of the Image of Cannibalism in North Sumatera", in Dominik Bonatz, John Miksic, J. David Neidel and Mai Lin Tjoa-Bonatz (eds). *From Distant Tale: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatera*. New Castle: Cambridge Scholars Publishing
- Husny, Tengku Lah (1978). *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950*. Jakarta: Departemen P dan K.
- Hutagalung, Waldemar M. (1926). *Poestaha Taringot toe Tarombo ni Bangso Batak Laguboti*: Zendingdrukkerij.
- Joustra. M. (1902). "Het leven, de zeden en gewooten der Bataks". *Mededelingen van wege het Netherlansch Zedelinggenootschap* 46: 385-426,
- Joustra. M. (1915). *Van Medan naar Padang en terug*. Leiden: S.C. van Doesburg, Uitgave van het Bataksch Instituut No. 11.
- Keuning, J. (1954). "Toba-Bataks en Mandailing-Bataks", *Indonesia* 7 (1953-1954): 170-171.
- Kipp, Rita Smith and Kipp, Richard D (ed.). (1983). *Beyond Samosir: recent studies of*

- the Batak peoples of Sumatera*. Ohio: Ohio University Papers in international studies, Southeast Asia Series No. 62.
- Kozok, Uli (2009). *Surat Batak: Sejarah Perkembangan Tulisan Batak Berikut Pedoman Menulis Aksara Batak dan Cap Si Singamangarajad XII*. Jakarta: KPG dan EFEO-Jakarta.
- Lamry, Muhammad Salleh (1996). *Mereka yang Terpinggirkan: Orang Melayu di Sumatera Utara*. Kuala Lumpur: Pusat Teknologi Pendidikan Universitas Kebangsaan Malaysia.
- Liddle, Raymond W. (1970). *Ethnicity, Party, and National Integration: An Indonesian case study*. New Heaven: Yale University Press.
- Loeb, Edwin M. (2013). *Sumatra: Sejarah dan Masyarakatnya*. Yogyakarta: Ombak.
- Marsden, William (2008). *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Masland, J. H. (1939). "De bloedgroepen der Mandailingers", *Geneeskundige Tijdschrift voor Nederlands Indie*, LXXIX, no. 12.
- Mckay, J. (1982). "An Exploratory Synthesis of Primordial and Mobilizationist approaches to Ethnic Phenomenon", *Ethnic and Racial Studies* 5 (4): 395-420.
- Meerwaldt, J. H. (1922). "Die nieuwe Bataksche Letterkunde", *Tijdschrift voor Zendelinwetenschap: Mededelingen*, 66: 295-311.
- Mills, J. V. G. (1970). *Ma Huan, Ying-yai Sheng-lan: The Overall Survey of the Oceans Shore*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nagata, Judith (1976). "The Status of Ethnicity and the Ethnicity of Status". *International Journal of Comparative Sociology* XVII (3-4): 242-260.
- Nainggolan, Togar (2006). *Batak Toba di Jakarta: Kontinuitas dan Perubahan Identitas*. Medan: Bina Media Perintis.
- Pane, Sutan Pane Paroehoem (1922). *Adat Batak*. Pematangsiantar.
- Pardede, J (1975). *Die Batakchristen auf Nord Sumatra und Ihr Verhaltnis zu den Muslimen*. Disertassion. Mainz: Johannes Gutenberg Universitat.
- Parkin, Harry (1978). *Batak Fruit of Hindu Thought*. Madras: The Christian Literature Society, Diocesan Press.
- Pedersen, Paul Bodholdt (1975). *Darah Batak, Jiwa Protestan: Perkembangan Gereja-gereja Batak di Sumatera Utara*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Pelly, Usman (2013) *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing di Kota Medan*. Medan: Unimed Press dan Casa Mesra.
- Pemdasu (1994). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara*. Medan: Pemdasu dan Diklat Propsi.
- Perret, Daniel (2010). *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO-Jakarta.
- Pewartari Deli* 15 Oktober 1919, 7 November 1919, 12 November 1919, 23 Januari 1920, 3 April 1922, 6 Maret 1922, 3 April 1922, 17 Mei 1922, 5 Juni 1922, 16 Juni 1922, 24 Mei 1922, 11 Agustus 1922, 20 Oktober 1922, 3 September 1922, 16 Oktober 1922, 6 Maret 1922, 25 September 1922, 26 September 1927, 3 Agustus 1939, dan 08 Agustus 1939.
- Pinto, Fernao Mendez (1991). *Peregrination*. R. Viale (trans). Paris: La Difference.
- Purba, O.H.S. dan Purba, E. Elvis (1998). *Migrasi Batak Toba di Luar Tapanuli Utara: Suatu Deskriptif*. Medan: Monora.
- Reid, Anthony (2009). "Is there Batak History", in John N. Miksic, J. David Neidel and Mai Lin Tjoa-Bonatz (eds). *From Distant Tale: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatra*. Newcastell: Cambridge Scholars Publishing.
- Reid, Anthony (2011). *Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia*. Masri Maris. Jakarta: Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.
- Royce, Annya Peterson (1983). *Ethnic Identity: Strategies of Diversity*. Bloomington: Indiana University Press.
- Rugua, Zhao (1966). *On His work on the Chinese and Arab Trade in the twelfth and thirteenth centuries entitled Chau-fan-chi*.

- Fr. Hirth and W.W. Rockhill (ed and trans). Amsterdam: Oriental Press.
- Schnitger, F. M. (1995). "Ruins of an Unknwon Kingdom", in *Witnesses to Sumatra: A Travellers Anthology*. Anthony Reid (ed.), Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Schreiner, Lothar (2008). *Adat dan injil: Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Schroder, E. E. W. G. (1920). *Gewestelijk Beschrijving*. Amsterdam: Instituut voor de Tropen.
- Shils, Edward M. (1957). "Primordial, Person, Sacred, and Civil Ties", *The British Journal of Sociology* 8: 130-145.
- Siregar, Susan Rodgers (1983). "Political Oratory in a Modernizing Southern Batak Homeland", Rita Smith Kipp and Richard D. Kipp (eds). *Beyond Samosir: Recent studies of the Batak Peoples of Sumatra*. Ohio: Ohio University Center for International Studies, Southeast Asia Program.
- Soedewo, Ery (2014). "Latar Belakang Penempatan dan Fungsi Peripih (Garbhapatra) Candi Simangambat", dalam *Sumatera Utara: Catatan Sejarah dan Arkeologi*. Yogyakarta: Ombak.
- Tichelman, G. L. (1936). "Bataksch Arbeiddreservaat", *Koloniaal Tijdschrift* XXV: 35-37.
- Tideman, J. (1932). *De Bataklanden, 1917-1931*. Leiden: Uitgaven van het Bataksch Instituut, No. 23.
- Langenberg, Michael van (1972). "Charles Millners accounts of Sumatra, 1770-1772", in *Review of Indonesian and Malayan Affairs* 6 (1): 116.
- Vergouwen, Jacob Cornelis (1964). *The Social Organization and Customary Law of the Toba-Batak of Nothern Sumatra*. The Hague: M. Nijhoff.
- Viner, A. C. (1980). "The Changing Batak", in *Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 52 (2): 84-112,
- Vorhooeve, Petrus (1955). *Critical Survey of Studies on the Language of Sumatra*. Bibliographical series 1. 's-Gravenhage: M. Nijhoff.
- Westenberg, C. J. (1897). "Verslag van eener reis naar de onafhankelijke Bataklanden ten noorden van het Tobameer", *Tidjschrift van de Nederlansch Aardrijkundig Genootschap* XIV: 1-112,
- Westenberg, C. J. (1905). "Bataksche rijkes Dolog en Poerba", *Tidjschrift van de Nederlansch Aardrijkundig Genootschap* XXII: 576-603.
- Wijngaarden, J. K. (1894). "Verslag omtrent de Zending onder Karau-Bataks over 1893". *MNZ* 38:133-183.
- Winckel, W. P. F. L. (1925). *Memorie van Overgave Assisten Resident Afdeeling Deli Serdang, 1921-1925*.
- "Polemik Etnisitas antara Batak dan Mandaling", Diakses online di <https://tirto.id/polemik-etnisitas-antara-batak-dan-mandailing-cze2>.